

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai Negara Hukum yang didasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan terdapat terwujudnya komitmen untuk menjunjung tinggi hak-hak setiap orang. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya tatanan, karena dengan adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib.¹ Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).²

Menurut Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Masalah keadilan dan hak asasi manusia bukanlah hal sederhana untuk diimplementasikan. Padahal banyak peristiwa dalam kehidupan menunjukkan bahwa keduanya tak berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Sebagaimana penting terkandung dalam Pancasila, Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³

Pada saat ini, masyarakat telah terlena oleh kecanggihan teknologi yang dapat merusak apabila mereka tidak dapat menyaring suatu informasi dan kebutuhan yang berasal dari teknologi

¹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm13

²Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 1

³Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Bandung:PT RajaGrafindo Persada), 2006, hlm. 24.

yang sedang berkembang. Sosial media telah banyak memberikan dampak yang negatif, dikarenakan dengan adanya berbagai fitur yang ada didalamnya untuk memperoleh suatu informasi dapat diakses oleh segala umur untuk kebutuhan dan kepuasan diri sendiri. Contohnya, foto maupun video yang berbau pornografi, yang disebarluaskan secara luas untuk memenuhi kepuasan seksual. Hal ini menjadi faktor terjadinya kejahatan tindak pidana yang berasal dari keinginan pelaku demi mencapai kepuasan dari dalam dirinya.

Masalah kejahatan adalah problem manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial dan produk dari masyarakat yang selalu mengalami perkembangan, bahkan dapat dikatakan bahwa usia kejahatan seumur dengan manusia karena dimana terdapat masyarakat disitu ada kejahatan.⁴ Kejahatan tidak mengenal berapa batasan usia dan siapa yang melakukan tindak pidana.

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁵

Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

⁴ Koesparmono Irsan, *Kejahatan Susila dan Pelecehan dalam Perspektif Kepolisian*, (Yogyakarta: Tp), 1995, hlm 85

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2004, hlm 20

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Salah satu tindak pidana yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat saat ini adalah tindak pidana perkosaan. Karena tindak pidana perkosaan melanggar Hak Asasi Manusia dalam kelangsungan hidupnya. Manusia pada dasarnya memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) yang diperoleh sejak lahir dan tidak dapat digugat oleh siapapun. Tindak pidana perkosaan mendapat sorotan tajam masyarakat tanpa memahami hakikat perkosaan tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosa berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa antara melanggar dengan kekerasan.⁶ Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.⁷

Menurut pendapat Soetandyo Wignjosebroto bahwa, “Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.”⁸ Perkosaan harus ditanggapi dengan serius dan perlu mendapatkan perhatian secara khusus untuk mengurangi ketakutan ditengah masyarakat.

Perkosaan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia seperti tertuang dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara khusus perkosaan merampas hak perempuan sebagai warga negara atas jaminan perlindungan dan rasa aman yang telah dijamin di dalam konstitusi pada Pasal 28G(1).

⁶ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 453

⁷ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Wanita, 1997, hlm. 97.

⁸<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/371> diakses 19 Maret 2019

Akibat dari perkosaan itu, perempuan korban dapat kehilangan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin (Pasal 28H(1)), hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28G(2)), dan bahkan mungkin kehilangan haknya untuk hidup (Pasal 28A). Banyak pula perempuan korban yang kehilangan haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 27(1) dan Pasal 28D(1)) karena tidak dapat mengakses proses hukum yang berkeadilan.

Menurut hukum pidana di Indonesia, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur sebagaimana berikut:

“Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan penjara selamalamanya dua belas tahun”.

Menurut data Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2018, Di Indonesia, tiga (3) jenis kasus kekerasan seksual oleh publik (jika pelaku tidak mempunyai hubungan kekerabatan, darah, ataupun perkawinan) adalah pencabulan (911 kasus), pelecehan seksual (708 kasus), dan perkosaan (669 kasus). Sedangkan pada kekerasan seksual *incest* (pelaku orang terdekat yang masih memiliki hubungan keluarga) kasus perkosaan sebanyak 619 kasus.⁹

Menurut Direktur Nurani Perempuan Yefri Heriani, berdasarkan Catatan Tahunan Nurani Perempuan Tahun 2017 di Wilayah Sumatera Barat, kasus kekerasan seksual yang dilaporkan adalah perkosaan dengan jumlah 39 kasus, disusul pelecehan seksual 12 kasus, eksploitasi seksual 2 kasus, indikasi perkosaan 3 kasus, kehamilan tak diinginkan 11 kasus, aborsi paksa 2 kasus, dan perkawinan paksa 3 kasus.¹⁰

⁹Catatan Tahunan (CATAHU) Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme, Komnas Perempuan, Jakarta: 2018, hlm. 1

¹⁰<https://padangkita.com/kekerasan-seksual-pada-perempuan-makin-meningkat/> diakses 27 Februari 2019, pukul 11:01 WIB

Permasalahan perkosaan bukan hanya dalam menyikapi kejahatan saja, tetapi bagaimana aparat penegak hukum yang mampu memberi perlindungan yang layak terhadap korban dan saksi yang berada pada tempat perkara kejadian dan mengurangi *victim blaming* (menyalahkan korban). Inilah permasalahan yang masih kurang disoroti oleh publik dalam media pers saat sekarang ini.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu perhatian serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari bentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.¹¹

Padahal apabila mengamati sebuah masalah kejahatan secara komprehensif, tidak boleh diabaikannya peranan korban dalam terjadinya kejahatan. Peranan korban dalam pemeriksaan sangat strategis. Sedikit banyaknya penentuan pelaku kejahatan dapat memperoleh hukuman setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, karena kurangnya diatur perlindungan korban dalam Kitab Hukum Acara Pidana.

Secara khusus, Pemerintah Republik Indonesia mengatur perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor

¹¹Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Bandung: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 25.

31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.¹²

Dampak dari tindak pidana perkosaan yang dialami menimbulkan beberapa efek, diantaranya depresi, gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan.¹³ Stres paska perkosaan yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stres yang langsung terjadi dan stres jangka panjang. Stres yang langsung terjadi merupakan reaksi paska perkosaan seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya. Stres jangka panjang merupakan gejala psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban memiliki rasa kurang percaya diri, konsep diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan, dan juga reaksi somatik seperti jantung berdebar dan keringat berlebihan.

Apabila setelah terjadinya peristiwa perkosaan tersebut tidak ada dukungan yang diberikan kepada korban, maka korban dapat mengalami *post traumatic stress disorder* (PTSD), yaitu gangguan secara emosi yang berupa mimpi buruk, sulit tidur, kehilangan nafsu makan, depresi, ketakutan dan stress akibat peristiwa yang dialami korban dan telah terjadi selama lebih dari 30 hari.¹⁴ Maka dari itu, perlunya ada perhatian terhadap korban dalam pemberian rehabilitasi psikis tersebut.

Rehabilitasi menurut KUHP adalah terdapat dalam BAB 1 mengenai Ketentuan Umum, tertera dalam Pasal 1 butir 23 yang berbunyi:

¹²Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹³*Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak*, <https://loveindonesiachildren.wordpress.com/2016/06/23/25458/>

¹⁴ <https://jurnal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/7011/5463> diakses tanggal 14 Maret 2019

“Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan hak dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut acara yang diluar undang-undang ini”.

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.¹⁵ Sedangkan Psikologis menurut Bilson Simamora, Psikologis merupakan faktor yang berasal dari dalam individu seseorang dan unsur-unsur psikologis ini meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, kepribadian, memori, emosi, kepercayaan, dan sikap.¹⁶ Maka dapat disimpulkan, bahwa Rehabilitasi Psikologis adalah suatu program yang dijalankan yang berguna membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis dari psikologisnya.¹⁷

Menurut ketentuan Pasal 6 angka (1) Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi piskososial dan psikologis.”

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan apa itu LPSK, adalah sebagai berikut:

¹⁵ <https://kbbi.web.id/rehabilitasi> diakses tanggal 18 Maret 2019

¹⁶ <http://www.lepank.com/2012/07/pengertian-psikologis-menurut-beberapa.html> diakses tanggal 18 Maret 2019

¹⁷ David Arnot, *Pustaka Kesehatan Populer Pengobatan Praktis: perawatan alternatif Dan Tradisional*, Volume 7, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009, hlm 180

“Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud Pasal 5 diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai berikut:

- 1) Tata cara memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni sebagai berikut:
 - a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
 - b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan.
- 2) Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban memiliki berhak mendapatkan rehabilitasi psikologis. Rehabilitasi yang dimaksud bertujuan agar korban dapat mendapatkan pemulihan mental atau psikologis pasca tindak pidana perkosaan. Dalam hal ini dokter harus melakukan pendekatan untuk membantu korban mengatasi gangguan psikologis dan menyadari potensi maksimal korban baik secara fisik, psikiatrik dan sosial di dunia luar dan dunia nyata.¹⁸Korban biasanya menderita rendah diri atau kurangnya pandangan positif tentang kehidupan, oleh sebab itu pentingnya program rehabilitasi.

Pada kenyataannya setelah melakukan pra penelitian, penulis menemukan beberapa kasus yang yang diberi program rehabilitasi psikologis maupun tidak diberi sama sekalipun baik dalam proses penyidikan sampai proses putusan pengadilan. Padahal rehabilitasi pada saat penyidikan

¹⁸David Arnot, *Pustaka Kesehatan Populer Pengobatan Praktis: perawatan alternatif Dan Tradisional*, Volume 7, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009, hlm 180

sangatlah dianggap penting. Namun, pada umumnya polisi bersifat pasif dalam tahap penyidikan. Inilah yang menjadi kelemahan dalam proses penyidikan kepolisian terhadap korban tindak pidana. Tidak adanya persiapan yang matang oleh pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan. Sehingga dapat dikatakan tak adanya rehabilitasi psikologis diberikan oleh kepolisian dalam proses penyidikan terhadap korban.

Sehingga timbulah masalah hukum, dimana tidak terlaksana hak-hak korban mendapatkan rehabilitasi Psikologis sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pihak korban biasanya tidak mendapatkan rehabilitasi psikologis dalam waktu penyidikan sampai proses putusan hakim.¹⁹ Selain itu pada umumnya pihak korban tidak mengetahui adanya bantuan hak rehabilitasi psikologis dari LPSK, baik dalam pengajuan, dalam tata cara serta syarat pemberian bantuan hak rehabilitasi. Biasanya pengetahuan rehabilitasi didapatkan oleh korban didapatkan setelah memiliki tim kuasa hukum.

Penulis menemukan kasus yang korbannya diberi perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam penyidikan. Kronologi kasus yang terjadi merupakan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh delapan orang pemuda secara berulang di Kabupaten Sijunjung, sebagaimana laporan polisi dengan nomor : STPL/02/I/2018/Spkt-Polsek pada tanggal 17 Januari 2018 pada Polres Sijunjung.

Pada 20 Juli 2017 sekira pukul 20.00 WIB , korban pergi ke warnet, seketika itu korban ditelfon oleh pelaku berinisial Y namun korban menolak karena sudah malam. Korban dihadang saat melewati Tugu Simpang Tiga oleh YA, TN, dan TEUK. Pelaku memaksa korban untuk pergi, dan membawa korban ke salah satu bangunan PAUD lalu melakukan perkosaan. Setelah

¹⁹Wawancara dengan pihak LBH yang mewakili LPSK dalam pemberian bantuan hukum terhadap korban pada tanggal 14 Febuari 2019

itu korban merasakan kebingungan dengan perasaan ketakutan pulang ke rumah tanpa menceritakan kepada kepada siapapun karena ketakutan. Perkosaan terjadi berulang pada tanggal 22 Juli 2017, 19 Agustus 2017 dan pada bulan Agustus yang tak diingat tanggalnya oleh korban, serta percobaan perkosaan Pada bulan September 2017.

Korban merasa depresi dan ketakutan namun tetap diam hingga korban hamil. Keluarga melakukan pelaporan kepada Polsek Sektor VII Sijunjung. Keluarga meminta bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum Padang untuk menangani kasus tersebut, yang kemudian LBH mengajukan surat permohonan bantuan rehabilitasi psikologis sebagai pemulihan mental korban kepada LPSK, hal ini dilakukan setelah melakukan wawancara dengan pihak korban sesuai dengan kondisi korban.²⁰ LPSK memproses surat dalam beberapa hari, lalu mendatangkan tim *Assesment* yang selanjutnya memeriksa kasus tersebut ke tempat kejadian perkara. Setelah diperiksa, pihak LPSK merapatkan di kantor LPSK yang selanjutnya memberi keputusan mendatangkan salah satu RSJ HB. Saanin Padang yang bertempat di Ulu Gadut Kota Padang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melihat bagaimana pelaksanaan hak rehabilitasi psikologis bagi korban perkosaan tersebut. Oleh sebab itu, penulis ingin membuat penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN HAK REHABILITASI PSIKOLOGIS BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi di Wilayah Hukum Polres Sijunjung)”**.

B. Rumusan Masalah

²⁰Wawancara dengan pihak LBH yang mewakili LPSK dalam pemberian bantuan hukum terhadap korban pada tanggal 14 Februari 2019

Dari uraian disampaikan pada latarbelakang diatas, maka beberapa hal yang dijadikan pokok permasalahan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan hak rehabilitasi psikologis atas korban tindak pidana perkosaan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Wilayah Hukum Polres Sijunjung ?
2. Apa kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam pemberian rehabilitasi psikologis terhadap korban tindak pidana perkosaan?
3. Bagaimana upaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk mengatasi kendala dalam pemberian rehabilitasi psikologis terhadap korban tindak pidana perkosaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian yang akan dilakukan sebagaimana rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi psikologis kepada korban tindak pidana perkosaan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Untuk mengetahui kendala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan rehabilitasi psikologis terhadap korban tindak pidana perkosaan.
3. Untuk mengetahui upaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam mengatasi kendala memberikan bantuan rehabilitasi psikologis bagi korban tindak pidana perkosaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberi pengembangan ilmu pengetahuan serta wawasan di bidang hukum pidana dan menambah pengetahuan di bidang perlindungan saksi dan korban.

- b. Dapat menjadi sumber referensi dan bahan informasi ilmiah untuk penelitian hukum selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh aparat penegak hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk melaksanakan perlindungan yang lebih baik.
- b. Untuk memberi informasi tentang bagaimana pelaksanaan hak rehabilitasi psikologis bagi korban selama ini kepada masyarakat.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.²¹ Acuan dalam pembuatan penulisan penelitian melalui berbagai macam cara. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan, sebagai suatu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian dan penulisan.²²

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) pada

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. 125.

²²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 73.

masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum.²³

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia ialah berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia menggunakan prinsip pengakuan dan perlindungan harkat martabat manusia serta tercapainya kemanusiaan yang adil dan beradab.

Hukum pada dasarnya melindungi Hak-Hak Asasi Manusia, sehingga menjunjung tinggi hak-hak yang melekat pada diri manusia secara alamiah. Maka dapat dikatakan bahwa hukum tidak hanya semata-mata refleksi kekuasaan, tetapi juga menyanjung perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Hukum mencakupi nilai-nilai kemanusiaan yang membentuk norma-norma yang menghormati eksistensi martabat manusia dan mengakui adanya HAM. HAM merupakan sarana untuk masyarakat untuk melangsungkan hidupnya dengan aman, damai dan sejahtera.

Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai, dan hak asasinya.²⁴

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya

²³Soetjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.

²⁴Maya Indah S., *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 13.

dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat itu.²⁵

Pentingnya korban memperoleh perhatian utama dalam membahas kejahatan disebabkan korban seringkali memiliki peranan yang penting bagi terjadinya suatu tindak pidana. Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban tindak pidana kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Korban tidak diberi kewenangan dan tidak terlibat aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.²⁶

Urgensinya korban memperoleh perlindungan dengan tujuan mendapat haknya secara utuh. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban tindak pidana yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.²⁷

²⁵C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm.41

²⁶Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Bandung: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm 26

²⁷Sajipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing: Yogyakarta, 2009, hlm 9

Menurut Muladi, sebagai suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:²⁸

- a. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang disebut kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi yaitu 2 tahap penerapan hukum oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana disebut tahap kebijakan eksekutif.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjabarkan konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan untuk sebagai dasar penelitian hukum. Pentingnya definisi sebagai langkah menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari istilah yang dipakai.

a. Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).²⁹ Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.³⁰

²⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm 13

²⁹ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> diakses tanggal 6 November 2018

³⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana serta kebijaksanaan yang dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan lanjut setelah program atau kebijaksanaan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategi maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.³¹

Dari pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan adalah tindakan atau cara mengimplementasikan dari sebuah perencanaan kegiatan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan beberapa usaha-usaha dan didukung alat-alat penunjang.

b. Hak

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.³²

c. Rehabilitasi Psikologis

Rehabilitasi adalah sebuah [kegiatan](#) ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai [penyakit](#) serius atau cacat yang memerlukan pengobatan [medis](#) untuk mencapai kemampuan fisik [psikologis](#), dan [sosial](#) yang maksimal.³³ Sumber lain menjelaskan bahwa Rehabilitasi adalah suatu program yang dijalankan yang berguna

³¹ Abdullah Syukur, Kumpulan Makalah” *Study Implementasi Latar Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*”, Ujung Pandang: Persadi, 1987, hlm 40

³² <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>

³³ David Arnot, dkk, *Pustaka kesehatan Populer Pengobatan Praktis: perawatan Alternatif dan tradisional*, volume 7. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009, hlm 180.

untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya.³⁴

Menurut KBBI Psikologis ialah berkenaan dengan psikologi; bersifat kejiwaan. **Definisi Psikologis** berarti berkaitan dengan bagaimana pikiran bekerja dan berpikir dan merasa yang mempengaruhi perilaku.³⁵ Rehabilitasi Psikologis adalah suatu program yang dijalankan yang berguna membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis dari psikologisnya.³⁶ *Rehabilitasi Psikologis adalah kegiatan* ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai permasalahan kejiwaan, mental guna pemulihan kepada kondisi mental yang semula.

d. Korban

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 Ayat (3) *“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”*

Menurut Van Boven, Korban merujuk kepada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut yaitu orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan maupun karena kelalaian.³⁷

Menurut Muladi, korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun

³⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Rehabilitasi> diakses tanggal 6 November 2018

³⁵<http://menurutparaahli.com/tag/psikologis-adalah/> diakses pada tanggal 9 April 2019

³⁶David Arnot, *Pustaka Kesehatan Populer Pengobatan Praktis: perawatan alternatif Dan Tradisional*, Volume 7, Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2009, hlm 180

³⁷Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm 49-50.

kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³⁸

e. Perkosaan

Menurut hukum pidana di Indonesia, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur perkosaan yaitu “Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosa berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa antara melanggar dengan kekerasan.³⁹ Menurut pendapat Soetandyo Wignjosebroto bahwa, “Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.”⁴⁰

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan

³⁸ Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, dikutip dari M.arif mansur dan Elisatriis Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatam Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 47

³⁹ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pres, 2007, hlm. 453

⁴⁰ <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/371> diakses 19 Maret 2019

penelitian ini berupa pendekatan undang-undang, kasus dan konseptual, maksudnya penelitian yang dilakukan terhadap perilaku hukum atau dilihat dari segi operasionalnya yang melihat kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan tentang penerapan peraturan-peraturan perundang-undangan.⁴¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, merupakan pengungkapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.⁴² Dalam penelitian ini penulis menggambarkan bagaimana pelaksanaan Hak Rehabilitasi Psikologis terhadap korban tindak pidana perkosaan dan kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam pemberian hak tersebut.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset

⁴¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm 105-106

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm 93.

(orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian.⁴³

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, karya tulis, jurnal, laporan khusus, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder ini terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, mempunyai kekuatan hukum dan yang dirumuskan oleh legislator, pemerintah dan lain sebagainya yang berwenang yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, disamping itu juga kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁴

c) Bahan Hukum Tersier

⁴³<http://accounting-media.blogspot.com/2014/06/data-primer-dan-data-sekunder.html> tanggal 15 April 2019

⁴⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm 155.

Bahan Hukum Tersier ialah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁴⁵

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.⁴⁶ Bahan tersebut diperoleh Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, serta buku-buku pribadi.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan tujuan memperoleh data dari lapangan secara langsung dari berbagai informasi yang diperoleh di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang objek yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Dokumen

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012, hlm 114

⁴⁶ <https://april04thiem.wordpress.com/2010/11/12/studi-kepustakaan/> diakses pada tanggal 15 April 2019

Menurut Sugiyono pengertian Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁴⁷

b. Wawancara

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, yaitu dengan melakukan kontak dengan sumber data atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).⁴⁸ Untuk memperoleh data, penulis melakukan wawancara dengan pihak yang terkait tentang apa yang akan diteliti. Metode wawancara digunakan ialah semi-struktur yang mana pertanyaan telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan masalah yang akan diteliti. Dengan memberikan beberapa pertanyaan yang telah disusun, maupun pertanyaan yang muncul saat wawancara berlangsung. Wawancara akan dilakukan kepada Lembaga Bantuan Hukum Padang, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Jakarta Timur dan Polres Kota Sijunjung.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dari lapangan sehingga siap untuk di analisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil didapatkan, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut melalui proses :

1. Pengolahan

⁴⁷ <http://seputarpengertian.blogspot.com/2017/09/pengertian-studi-dokumentasi-serta-kekurangan-Kelebihan.html> diakses pada tanggal 15 April 2019

⁴⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005, hlm. 72.

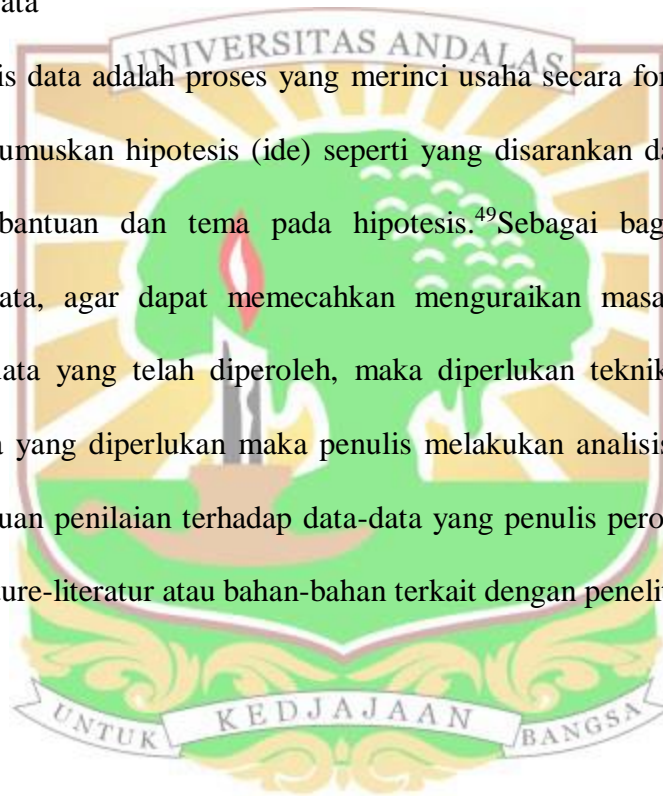
Pengolahan data yang telah diperoleh dan disaring menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.

2. Pengklarifikasikan

Pengklarifikasian data menurut kriteria yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memudahkan analisa data yang akan dilakukan.

b. Analisis Data

Analisis data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis.⁴⁹ Sebagai bagian tindak lanjut dari pengolahan data, agar dapat memecahkan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan data yang telah diperoleh, maka diperlukan teknik analisis data. Setelah diperoleh data yang diperlukan maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yaitu dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis peroleh di lapangan dengan bantuan literature-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian.



⁴⁹<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/analisis-data.html> diakses pada tanggal 22 April 2019

